

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI PADI
DENGAN AKAD TERIKAT
(Studi Kasus di Desa Panggung Rejo Kecamatan Rawajitu Utara
Kabupaten Mesuji)**

Skripsi

Diajukan untuk melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Ilmu Syariah (Muamalah)

**Oleh:
RUDIANTO
NPM. 1721030398**

Jurusan: Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H/2021 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI PADI
DENGAN AKAD TERIKAT
(Studi Kasus di Desa Panggung Rejo Kecamatan Rawajitu Utara
Kabupaten Mesuji)**

Skripsi

Diajukan untuk melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Ilmu Syariah (Muamalah)



Pembimbing I : Drs. H. Chaidir Nasution, M.H
Pembimbing II : Frenki, M.Si.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H/2021 M**

ABSTRAK

Berawal dari kegiatan sehari-hari masyarakat desa Panggung Rejo Kecamatan Rawajitu Utara Kabupaten Mesuji, bahwa terdapat suatu persetujuan antara kedua belah pihak dimana petani dengan pemilik mesin pemanen padi setiap hasil panennya harus dijual kepemilik mesin dengan harga dibawah pasaran, dikarenakan petani sudah melakukan kesepakatan kepada pemilik mesin setelah padi selesai dipanen harus dijual kepemilik mesin yang sudah menyewakan mesin pemanennya tersebut. Sedangkan untuk pembayarannya dilakukan secara langsung atau setelah pemilik mesin menjual kembali hasil panen petani ke pengepul bulog, dalam hal ini petani merasa dirugikan atau ada unsur keterpaksaan kepada pemilik mesin karena harga jual yang terpaut murah dibandingkan petani lain yang tidak menggunakan mesin sedangkan dalam perjanjian hanya menjual kepemilik mesin tidak ada harga yang ditentukan. Dalam skripsi ini terdapat persetujuan antara kedua belah pihak antara pemilik mesin dengan petani yang terikat kesepakatan dalam jual beli yang mana seharusnya petani mendapat kebebasan untuk menjual padinya ke siapapun. Permasalahan dalam penelitian ini 1. Bagaimana praktik jual beli padi dengan akad terikat di Desa Panggung Rejo 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang jual beli padi dengan akad terikat.

Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dilingkungan masyarakat yang menjadi tempat penelitian dan analisis secara deskriptif analisis yaitu memaparkan dan melaporkan suatu objek, keadaan, kebiasaan, dan perilaku tertentu kemudian dianalisis secara kritis. Data diperoleh melalui wawancara dengan responden yaitu pemilik mesin pemanen dengan petani sebagai sumber data utama sedangkan sumber data sekunder diperoleh melalui pustaka atau dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data skripsi ini menggunakan wawancara dan dokumentasi. Analisa dalam penelitian ini dengan metode deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan jual beli padi yang terjadi yaitu pemilik mesin dan petani sudah melakukan kesepakatan secara lisan dan apabila setuju petani harus menjual padinya dengan harga yang sudah ditentukan oleh pemilik mesin pemanen. Sedangkan pemilik mesin pemanen tidak memberikan harga sesuai dengan standar pasaran jual beli padi, oleh karena itu petani tidak sepenuhnya mendapat keadilan sebab ada unsur keterpaksaan, maka secara hukum bahwa pelaksanaan jual beli tersebut

tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam hukum islam dikarenakan ada salah satu pihak yang dirugikan.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangandibawah ini:

Nama : Rudianto
NPM : 1721030398
Jurusan/Prodi : Muamalah
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Padi Dengan Akad Terikat” (Studi Kasus di Desa Panggung Rejo Kecamatan Rawajitu Utara Kabupaten Mesuji) Adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebutkan dalam *footnote* atau *daftar pustaka*. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar lampung April 2021

Penulis



Rudianto

NPM: 1721030398



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl.Letkol. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung. Telp: (0721) 703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG
JUAL BELI PADI DENGAN AKAD
TERIKAT (Studi Kasus di Desa Panggung
Rejo Kecamatan Rawajitu Utara Kabupaten
Mesuji)**

Nama : RUDIANTO

NPM : 1721030398

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Drs. H. Chaidir Nasution, M.H

NIP.195802011986031002

Pembimbing II

Frenki, M.Si.

NIP.198003152009011017

**Ketua
Jurusan Mu'amalah**

Khoiruddin, M.S.I

NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl.Letkol. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung. Telp: (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI PADI DENGAN AKAD TERIKAT (Studi Kasus di Desa Panggung Rejo Kecamatan Rawajitu Utara Kabupaten Mesuji)** disusun oleh, RUDIANTO, NPM: 1721030398, Program Studi Hukum, Ekonomi Syariah, Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari'ah UIN raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : Senin, 28 Juni 2021

TIM PENGUJI

Ketua : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I (.....)

Sekretaris : Erik Rahman Gumiri, MH. (.....)

Penguji I : Drs. H. Haryanto H., M.H. (.....)

Penguji II : Drs. H. Chaidir Nasution, M.H (.....)

Penguji III : Frenki, M.Si. (.....)



**Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah**

**Dr. H. Khairuddin, M.H.
NIP. 195808241989031003**

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

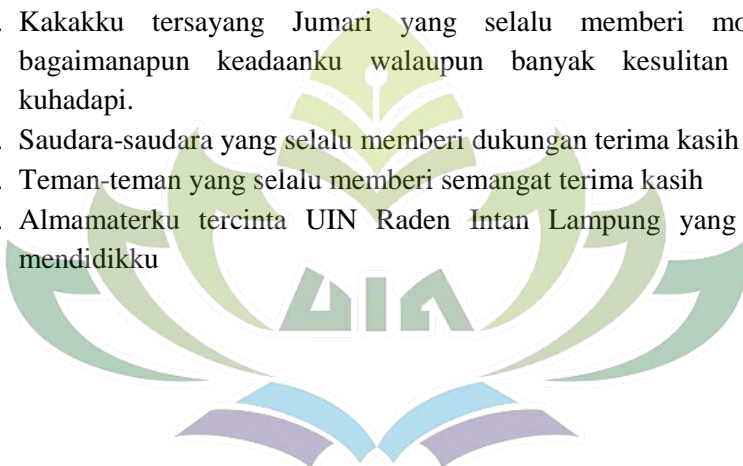
Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan jangan kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu.”.(Terjemahan QS. An-Nisa : 29)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin. Dengan menyebut nama Allah SWT, penuh cinta kasihnya yang telah memberikan penulis kekuatan dan telah menuntun dan menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku Bapak Ratmo dan Mama Nasiyem yang telah membimbing dan berkorban jiwa dan raga, kasih sayang, do'a dan motivasi dari bapak dan mama yang selalu menguatkan setiap langkahku meskipun banyak kesulitan yang dihadapi. Terima kasih kepada bapak dan mama semoga Allah SWT senantiasa memuliakan baik di dunia maupun di akhirat. Aamiin
2. Kakakku tersayang Jumari yang selalu memberi motivasi bagaimanapun keadaanku walaupun banyak kesulitan yang kuhadapi.
3. Saudara-saudara yang selalu memberi dukungan terima kasih
4. Teman-teman yang selalu memberi semangat terima kasih
5. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidikku



RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Rudianto dilahirkan di Desa Panggung Rejo Kecamatan Rawajitu Utara Kabupaten Mesuji, anak kelima dari 5 bersaudara, dari pasangan bapak Ratmo dan Ibu Nasyem. Adapun riwayat pendidikan penulis, sebagai berikut:

1. SDN 02 Panggung Rejo, lulus pada tahun 2009
2. SMPN Rawajitu Selatan, lulus pada tahun 2011
3. SMKN Rawajitu Utara, lulus pada tahun 2017
4. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah Jurusan Muamalah, lulus pada tahun 2021

Bandar Lampung, April 2021
Penyusun,

Rudianto



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kahadirat Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan Iman, Islam dan kesehatan jasmani maupun rohani. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, semoga kita dapat mendapat syafaatnya pada hari kiamat nantinya. Skripsi ini berjudul Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli dengan Akad Terikat (Studi Kasus di Desa Panggung Rejo Kecamatan Rawajitu Utara Kabupaten Mesuji). Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar di UIN Raden Intan Lampung. Jika di dalamnya dapat dijumpai kebenaran maka itu yang dituju dan dikehendaki. Tetapi jika terdapat kekeliruan dan kesalahan berfikir, sesungguhnya itu terjadi karena ketidak sengajaan dan karena keterbatasan ilmu pengetahuan penulis. Karena saran, koreksi dan kritik yang proporsional dan konstruktif sangat diharapkan.

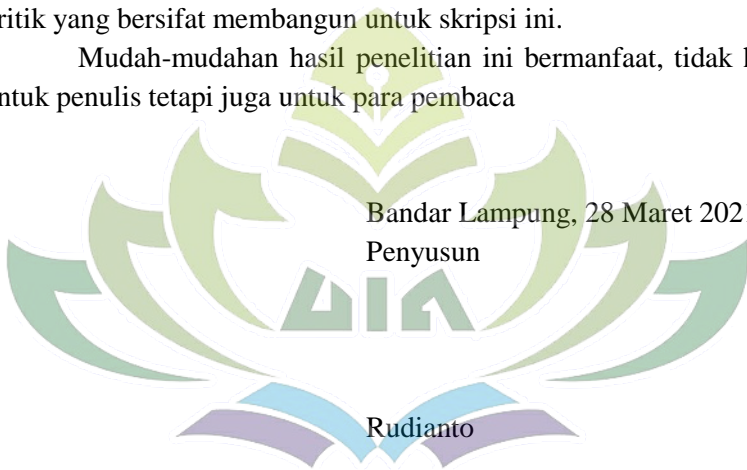
Penulisan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu melalui skripsi ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Bapak Dr. H. Khairuddin Tahmid, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I dan Ibu Juhrotul Khulwah, M.Si. Selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Muamalah.
4. Bapak Drs. H. Chaidir Nasution, M.H. dan Bapak Frenki, M.Si. selaku pembimbing I dan pembimbing II, yang telah menyediakan waktu dan pemikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan agar tersusunnya skripsi ini.
5. Seluruh Dosen, Asisten dosen dan Pegawai Fakultas Syari'ah UIN RadenIntan Lampung yang telah membimbing dan membantu penulis selama mengikuti perkuliahan.
6. Ibu Ropiah selaku kepala Desa Panggung Rejo, beserta semua pihak yang telah memberikan izin untuk penelitian dan berkenan memberi bantuan selama melakukan penelitian.

7. Teman Laki-laki dan Perempuan yang bisa menjadi teman, sahabat sekaligus keluarga yang selalu menyemangati.
8. Teman-teman seperjuanganku angkatan 2017 dan yang terkhusus teman-teman Muamalah H.
9. Teman-teman KKN-DR desa Way Serdang, Vikto, Sabar, Laela, Melani, Neneng dan Tirka.
10. Dan semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan, hal ini disebabkan masih terbatasnya ilmu dan teori penelitian yang penulis kuasai. Oleh karena itu penulis mengharapkan masukan dan kritik yang bersifat membangun untuk skripsi ini.

Mudah-mudahan hasil penelitian ini bermanfaat, tidak hanya untuk penulis tetapi juga untuk para pembaca



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
SURAT PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR TABEL.....	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Batasan Masalah	3
D. Fokus Penelitian.....	3
E. Rumusan Masalah	4
F. Tujuan Penelitian	4
G. Signifikansi Penelitian	4
H. Studi Pustaka.....	5
I. Metode Penelitian	6
J. Kerangka / Sistematika Pembahasan	9

BAB II LANDASAN TEORI

A. Jual Beli dalam Hukum Islam	11
1. Pengertian dan Dasar Hukum	11
2. Rukun dan Syarat	17
3. Macam-Macamnya	22
4. Jual Beli Yang Dilarang	27
5. 'Urf (Adat Kebiasaan) Dalam Jual Beli	33
B. Akad dan Akibat Hukumnya.....	39
1. Pengertian dan Dasar Hukum	39

2. Rukun dan Syarat	41
3. Akibat Hukumnya	44

BAB III HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Panggung Rejo Kecamatan Rawajitu Utara Kabupaten Mesuji .	47
1. Letak Geogrrais	47
2. Luas Wilayah	48
3. Potensi Pertanian	50
4. Pekerjaan Masyarakat.....	51
B. Pelaksanaan Jual Beli Padi dengan Akad terikat di Desa Panggung Rejo.....	53

BAB IV ANALISA DATA

A. Jual Beli Padi dengan Akad Terikat di Desa Panggung Rejo Kecamatan Rawajitu Utara Kabupaten Mesuji	59
B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Padi dengan Akad terikat	61

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	67
B. Saran	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data luas wilayah	56
Tabel 2 Nama TR/SK	56
Tabel 3 Struktur jabatan	57
Tabel 4 Pekerjaan masyarakat	60
Tabel 5 Data jenjang sekolah	61
Tabel 6 Sampel petani padi	62
Tabel 7 Sampel pemilik mesin	62
Tabel 8 Data perbedaan penetapan harga	63



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul. Di samping itu langkah ini merupakan pokok penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas.

Judul dari skripsi ini adalah Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Padi dengan Akad Terikat (Studi Kasus di Desa Panggung Rejo Kecamatan Rawajitu Utara Kabupaten Mesuji), adapun beberapa istilah yang terdapat dalam judul dan perlu untuk diuraikan adalah sebagai berikut:

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul baik langsung maupun tidak langsung yang mengatur tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat semua yang beragama Islam.¹

Akad terikat yaitu bisa diartikan sebagai akad bersyarat yang mana kesepakatan dalam suatu perjanjian antara kedua belah pihak atau lebih dengan adanya syarat antara salah satu pihak yang harus disetujui antara keduanya dan saling mengikat untuk melakukan suatu transaksi, dan tidak ada hak untuk membatalkan transaksi dalam rentang waktu tertentu yang telah disepakati di awal.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa maksud dari judul skripsi ini adalah suatu upaya pengkajian secara mendalam mengenai Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Padi dengan Akad Terikat (Studi Kasus di Desa Panggung Rejo Kecamatan Rawajitu Utara Kabupaten Mesuji).

¹Amir syafuddin, *Ushul fiqh*, Jilid I (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h.

B. Latar Belakang Masalah

Sesuai dengan perkembangan zaman banyak yang dimanfaatkan untuk mencari peluang bisnis sebagai salah satu upaya untuk mencari rezeki yaitu dengan menggunakan mesin pemanen padi (*Combine*) di Desa Panggung Rejo yang dimaksud dengan alat pemanen padi merupakan suatu alat yang praktis untuk digunakan dimana alat ini mempunyai tiga fungsi yakni memotong, merontokkan, mengemaskan padi. Jasa mesin pemanen padi ini muncul sejak tahun 2015, pada saat itu hanya satu orang yang memiliki mesin pemanen padi. Karena sebagian masyarakat Desa Panggung Rejo bermata pencaharian sebagai petani, maka sebagian penduduk Desa Panggung Rejo yang berkeinginan mengembangkan peluang bisnis tersebut dengan cara menawarkan jasa mesin pemanen padi. Tetapi ada kesepakatan antara pemilik mesin pemanen padi dengan petani sebelum menggunakan mesin tersebut harus menjual padinya kepada pemilik mesin pemanen padi.²

Pertanian merupakan salah satu sumber perekonomian dalam kehidupan manusia karena gejolak ketersediaan dan harga akan berimplikasi terhadap sektor lain yang terkait.³ Dalam penjualan hasil panen padi pada tahun terakhir 2018 di Desa Panggung Rejo, petani masih belum sepenuhnya mendapatkan harga yang sesuai dengan standar penjualan karena ada unsur paksaan terhadap petani untuk menjual padinya kepada pihak yang mempunyai alat pemanen padi. Karena pemilik mesin pemanen padi membeli dengan harga murah atau tidak sesuai dengan standar ketetapan harga jual padi pada umumnya. Sehingga banyak petani yang mengeluh, karena masyarakat di Desa Panggung Rejo mayoritas berprofesi sebagai petani padi.

Berdasarkan uraian di atas ditemukan permasalahan tentang jual beli padi dengan akad terikat tidak sesuai melihat

²Waluyo, Petani, *Wawancara*, 15 Agustus 2020.

³Andre Budiman Panjaitan, *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Asuransi Pertanian di Indonesia Setelah Pemberlakuan UU No 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani*, (Skripsi, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 2014)

banyaknya para petani padi yang mengalami musim panen tetapi hanya dapat dijual kepada satu pembeli dengan harga di bawah standar, dengan alasan pembeli tersebut yang sudah memanen padi tersebut dengan menggunakan mesin pemanen padi (*combine*). Oleh karena itu peneliti mengangkat permasalahan ini sebagai objek peneliti dengan judul Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Padi dengan Akad Terikat (Studi Kasus di Desa Panggung Rejo Kecamatan Rawajitu Utara Kabupaten Mesuji).

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, penulis akan menjadikan acuan penelitian yang akan dikaji sesuai dengan permasalahan yang ada, yaitu:

1. Rental alat pemanen padi dibayar dengan menggunakan padi yang telah dipanen namun petani tetap harus menjual padinya ke pemilik mesin
2. Padi dibeli oleh pemilik mesin dibawah harga jual dipasaran saat panen

Pembatasan masalah dimaksudkan agar penelitian ini lebih terarah, sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Jual beli mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, oleh karena itu dalam penelitian ini dibatasi pada permasalahan;

1. Proses bayar jasa alat pemanen padi.
2. Proses jual beli padi petani kepada pemilik mesin pemanen padi.

D. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus penelitian ini adalah praktik jual beli padi dengan akad terikat di Desa Panggung Rejo Kecamatan Rawajitu Utara Kabupaten Mesuji dan status hukumnya menurut Islam.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah yang digunakan adalah:

1. Bagaimana praktik jual beli padi dengan akad terikat di Desa Panggung Rejo Kecamatan Rawajitu Utara Kabupaten Mesuji?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang jual beli padi dengan akad terikat tersebut?

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli padi dengan akad terikat di Desa Panggung Rejo Kecamatan Rawajitu Utara Kabupaten Mesuji.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang jual beli padi dengan akad terikat tersebut.

G. Signifikansi Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah wawasan dan pemahaman penulis khususnya mengenai tinjauan hukum Islam tentang jual beli padi dengan akad terikat dan diharapkan dapat memperkaya keilmuan Islam pada umumnya dan civitas akademik Fakultas Syariah jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat bagi penulis untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam ilmu syariah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

b. Bagi Peneliti Berikutnya

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bagian bahan acuan bagi peneliti berikutnya yang berminat meneliti mengenai jual beli padi dengan akad terikat.

H. Studi Pustaka

Banyak skripsi yang membahas tentang sewa menyewa yang hampir sama dengan penelitian ini, namun tentunya ada perbedaan dalam objek serta tempat yang digunakan sebagai kajian dalam penelitian. Maka diperlukan beberapa referensi yang digunakan sebagai bentuk penguat untuk penelitian ini.

Adapun skripsi tersebut antara lain:

1. Skripsi Mariyansyah Fakultas Syariah (2018) yang berjudul, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Akad Jual Beli Pepaya yang Terikat Harga pada Pengepul”. Skripsi ini mendeskripsikan bahwa jual beli terikat maksudnya adalah para petani tidak bisa menjual hasil panennya kepada pengepul lain atau pembeli lain karena ia sudah terikat.⁴

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian Mariyansyah adalah jika dalam penelitian Mariyansyah petani pada awal penanaman sudah meminjam modal berupa pupuk dan obat-obatan yang akan dibayar setelah masa panen yang berarti bahwa petani harus menjual hasil panennya kepada pengepul yang sudah meminjamkan modal sedangkan dalam penelitian ini petani menggunakan mesin pemanen padi yang disewakan oleh pemilik mesin namun petani harus menjual padi ke pemilik mesin.

2. Skripsi Aizza Alya Shofa jurusan Hukum Ekonomi Syariah UM Surakarta (2016) yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Padi dengan Sistem Tebas”. Skripsi ini mendeskripsikan bahwa pembeli atau penebas melakukan

⁴Mariyansyah, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Akad Jual Beli Pepaya yang Terikat Harga pada Pengepul” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2018), h.5

transaksi jual beli pada saat bulir padi sudah tumpah tetapi belum layak panen.⁵

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian Aizza Alya Shofa adalah jika dalam penelitian Aizza Alya Shofa pembeli memberikan uang muka terlebih dahulu yang mengakibatkan petani harus menjual hasil panen padinya ke pembeli sedangkan dalam penelitian ini hasil penjualan padi langsung dibayar ketika padi sudah di panen.

I. Metode Penelitian

Metode dapat diartikan sebagai suatu cara untuk melakukan teknis dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan. Sedangkan penelitian itu sendiri merupakan upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta secara sistematis untuk mewujudkan kebenaran. Metode penelitian merupakan suatu cara atau jalan untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap segala permasalahan.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Menurut jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu suatu metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat. Penelitian dimaksud untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan dan posisi saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya. Subjek penelitian dapat berupa individu, kelompok, institusi, atau masyarakat.⁶ Pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan khusus dan realitas tentang apa yang terjadi dimasyarakat jadi mengadakan penelitian mengenai

⁵Aizza Alya Shofa, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Padi dengan Sistem Tebas” (Skripsi, UM Surakarta, 2016), h. 2

⁶Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), h. 54

beberapa masalah aktual yang kini telah berkecamuk dan mengepresikan dalam bentuk gejala atau proses sosial.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, penelitian yang bersifat deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi, atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.⁷

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian yaitu petani dengan pemilik mesin pemanen di Desa Panggung Rejo Kecamatan Rawajitu Utara Kabupaten Mesuji.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, yaitu melalui buku-buku, dokumen-dokumen dan sumber lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti untuk memperkuat penelitian dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi dengan para petani.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap, objek atau nilai yang akan diteliti dalam populasi dapat berupa orang, perusahaan, lembaga, media sebagainya. Pada penelitian dilapangan ditemukan populasi yang berjumlah 10 petani dan 2 pemilik mesin pemanen padi di

⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 3.

Desa Panggung Rejo Kecamatan Rawajitu Utara Kabupaten Mesuji.

b. Sampel

Sampel adalah contoh yang mewakili dari populasi dan cermin dari keseluruhan objek yang diteliti. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah diambil dari populasi dan digunakan sebagai objek penelitian. Menurut Suharsimi Arikunto dalam pengambilan sampel apabila jumlah populasi yang akan diteliti kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi dan jika jumlah subjeknya lebih besar dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih.⁸ Karena jumlah populasi dalam penelitian ini kurang dari 100, maka keseluruhan populasi dijadikan sampel dengan teknik *total sampling*.

4. Pengumpulan Data

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian dilapangan (lokasi).⁹ Wawancara dilakukan guna menggali informasi secara langsung kepada para petani padi di Desa Panggung Rejo Kecamatan Rawajitu Utara Kabupaten Mesuji.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data apabila observasi yang dikumpulkan bersumber dari petani dan pemilik alat pemanen di Desa Panggung Rejo dan dokumen seperti buku, jurnal, surat kabar, majalah, notulen rapat, dan sebagainya.

⁸*Ibid.*, h. 120

⁹Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Adiyta Bakti, 2004), h. 36.

5. Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya adalah mengelola data tersebut dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu memeriksa ulang dari semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian.¹⁰
- b. *Organizing*, yaitu menyusun kembali data yang didapat dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis.¹¹
- c. Sistematika data (*sistemazing*) yaitu bertujuan untuk menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah, dengan cara melakukan pengelompokan data yang telah diedit dan kemudian diberi tanda menurut kategori-kategori dan urutan masalah.¹²

6. Analisa Data

Metode induktif ialah metode yang mempelajari suatu gejala khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku dilapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki. Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkenaan dengan sistem akad sewa menyewa alat pemanen padi dalam tinjauan hukum Islam.

J. Kerangka / Sistematika Pembahasan

Bab I merupakan pendahuluan dari skripsi ini yang berisi mengenai penegasan judul, latar belakang masalah, batasan masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian,

¹⁰*Ibid.*,h. 126.

¹¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif*, (Bandung: Alfa Beta, 2008), h. 243.

¹²*Ibid.*,h. 126.

signifikasi penelitian, studi pustaka, metode penelitian, kerangka/sistematika pembahasan.

Bab II merupakan bab yang mengurai tentang teori yang membahas jual beli. hal-hal yang meliputi jual beli dalam hukum Islam, definisi jual beli dan dasar hukum Islam, syarat dan rukun jual beli, macam-macam jual beli, dan ‘urf dalam jual beli tentang teori akad definisi dan dasar hukum akad, rukun dan syarat akad, macam-macam akad.

Bab III merupakan bab yang mengurai tentang gambaran umum lokasi penelitian yaitu Desa Panggung Rejo Kecamatan Rawajitu Utara Kabupaten Mesuji dan pelaksanaan tentang Jual Beli Padi dengan Akad Terikat di Desa Panggung Rejo Kecamatan Mesuji Utara Kabupaten Mesuji.

Bab IV merupakan inti dari skripsi. Bab ini menjelaskan tentang analisa data hasil penelitian mengenai Jual Beli Padi dengan Akad Terikat di Desa Panggung Rejo Kecamatan Mesuji Utara Kabupaten Mesuji dan analisa data penelitian tentang Jual Beli Padi dengan Akad Terikat menurut Hukum Islam

Bab V adalah bab terakhir berisi kesimpulan yang memuat jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah dan saran-saran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli dalam Hukum Islam

1. Pengertian dan Dasar Hukum

a. Pengertian

Setiap manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, agar mereka dapat membantu, tolong-menolong untuk keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing. Salah satunya dengan cara jual beli, baik dalam urusan kepentingan diri sendiri maupun untuk kemaslahatan umum.

Jual beli secara bahasa arab *Al-bai'* artinya menjual, mengganti atau menukar. Kata lain dari *al-bai'* adalah *asy-syira'*, *al-mubadalah* dan *at-tijarah*. Berkenaan dengan *at-tijarah*, sebagaimana firman Allah dalam QS. Fathir (35) Ayat 29 yang berbunyi:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا
رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تَجَرَّةً لَّنْ تَبُورَ ۖ

Artinya: “*Sesungguhnya orang-orang yang slalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugrahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi*”.¹³

¹³Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahan*, (Bandung: Diponegoro, 2000), h.106

Al-bai', *at-tijarah*, *al-mubadalah* juga memiliki makna mengambil, memberikan sesuatu atau barter. Kata *Al-bai'u* dapat digunakan untuk lawan katanya yakni *Al-syarau* yang memiliki arti beli. Dengan demikian kata *Al-bai'u* berarti jual dan sekaligus juga barter kata beli.¹⁴

Secara terminologi fiqh jual beli disebut dengan *al-ba'i* (menjual), mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'I* dalam terminologi fiqh terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *al-Syira* yang berarti membeli. Dengan demikian, *al-ba'i* mengandung sebuah makna menjual sekaligus membeli atau jual beli. Menurut Hanafiyah pengertian jual beli (*al-ba'i*) secara definitif yaitu tukar-menukar barang harta benda atau sesuatu yang ingin dibeli dengan barang yang setara nilainya dengan cara yang bermanfaat.

Menurut istilah (terminologi) jual beli mengandung arti sebagai berikut:

- 1) Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan cara melepaskan hak milik dari yang satu ke yang lain dengan dasar saling merelakan.
- 2) Pemilikan harta benda dengan jalan tukar-menukar yang sesuai dengan aturan syara'
- 3) Saling tukar menukar harta, saling menerima dan dapat dikelola melalui ijab dan kabul dengan cara yang sesuai dengan aturan syara'
- 4) Tukar-menukar barang yang satu dengan yang lain dengan cara yang diperbolehkan
- 5) Penukaran benda yang satu dengan yang lain melalui jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan.

¹⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 67

- 6) Aqad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.¹⁵

Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanbaliyah, bahwa jual beli (*al-ba'i*), yaitu tukar-menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.

Menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ba'i* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.¹⁶ Berdasarkan definisi di atas, maka pada dasarnya jual beli itu ialah tukar-menukar barang atau menukar barang dengan uang. Hal ini telah dipraktikkan oleh masyarakat primitif ketika belum digunakannya uang sebagai alat tukar menukar barang, yaitu dengan sistem barang diganti dengan barang (barter) yang dalam terminologi fiqh disebut dengan *ba'i al-Muqayyadah*. Meskipun jual beli dengan sistem barter telah ditinggalkan, diganti dengan menggunakan mata uang.

Tetapi terkadang esensi jual beli seperti itu masih berlaku, sekalipun untuk menentukan jumlah barang yang ditukar tetapi diperhitungkan dengan nilai mata uang tertentu, misalnya Indonesia membeli *spare part* kendaraan ke Jepang, maka barang yang diimpor itu dibayar.¹⁷

b. Dasar Hukum

Jual beli sebagai bagian dari *mu'amalah* mempunyai dasar hukum yang jelas, baik dari Al-Quran, As-Sunnah dan telah menjadi ijma' ulama dan kaum muslimin. Bahkan jual beli bukan hanya sekedar muamalah, akan tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan untuk saling tolong menolong sesama manusia.¹⁸

1. Dasar hukum dalam Al-Qur'an

¹⁵Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 68

¹⁶Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 101.

¹⁷*Ibid.*, h. 102.

¹⁸Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 22.

a. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

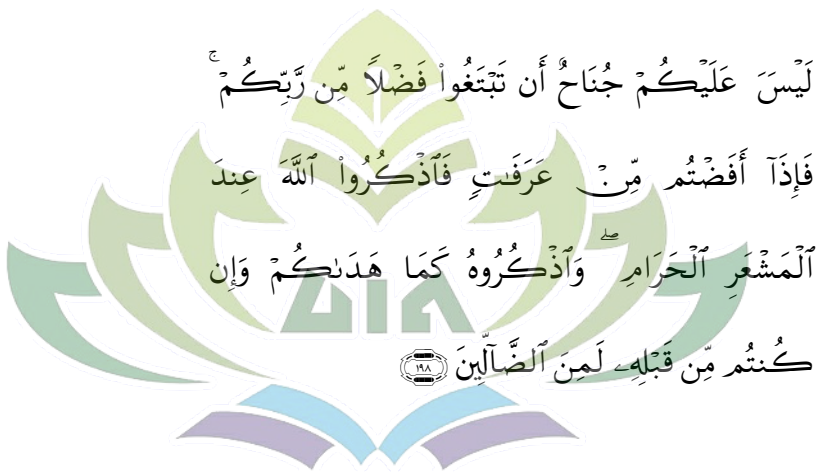
الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ
الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا
إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ
فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ
فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya”.¹⁹

¹⁹Dpartemen Agama RI, *AL-Quran dan Terjemahan*, (Ponorogo: CV Penerbit, 2010), h. 47.

Ayat di atas menjelaskan bahwa jual beli adalah transaksi yang diperbolehkan oleh syara' yang berarti bahwa hukumnya jelas boleh tetapi dilarang melakukan jual beli yang mengandung unsur riba. Riba adalah pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli ataupun transaksi yang lain tanpa diimbangi oleh suatu transaksi yang tidak dibenarkan dalam syari'ah.²⁰ Dalam ayat tersebut telah dijelaskan bahwa dalam melakukan transaksi Allah telah melarang manusia untuk melakukan riba karena sudah jelas dalam ayat di atas bahwa hukum dari riba adalah haram.

b. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 198:



Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah diMasy'aril haram. Dan ber-dzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu

²⁰Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h. 151

*sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat”.*²¹

Bersumber dari penjelasan ayat di atas dapat dipahami bahwa Allah telah melarang orang-orang yang beriman kepadanya untuk memakan harta yang *bathil* karena perbuatan itu melanggar ketentuan *syara'* dan dapat merugikan orang lain.

2. Hadist

Hadis yang mengemukakan tentang jual beli yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Ibnu Majjah yang berbunyi:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ
(رواه ابن ماجه)²²

Artinya: *Diriwayatkan oleh Ibn Hibban dan Ibn Majah sesungguhnya Rasulullah bersabda: Sesungguhnya jual beli itu harus atas dasar saling merelakan*”(HR. Ibn Hibban dan Ibn Majah).²³

Hadis di atas menjelaskan bahwa ketergantungan hukum sah atau tidaknya sebelum ijab dan qabul dilakukan sebab ijab qabul menunjukkan kerelaan (keridhaan).

²¹Muhammad Thalib, *Al-Quranul Karim Terjemahan Tafsiriah*, (Solo: CV Qolam Mas, 2012), h. 24.

²²As Shan'ani, *Subulus Salam III, terj. Abu Bakar Muhammad*, (Surabaya: Al-ikhlas, 1995), h. 12

²³Syamsul Rizal Hamid, *Hadis & Sunah Pilihan*, (Depok: Kaysa Media, 2017), h. 130

3. Ijma'

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhandirinya tanpa adanya bantuan dari orang lain. Tetapi bantuan atau barang yang dimiliki oleh orang lain yang kita butuhkan itu harus diganti dengan barang lain yang sesuai. Dengan jual beli yang benar dan sesuai syariat, kehidupan manusia akan berjalan dengan dinamis dan kebutuhan mereka dapat terpenuhi dengan mudah.²⁴

Dari penjelasan di atas, dapat penulis pahami bahwa jual beli itu diperbolehkan dan prinsip utama dalam jual beli adalah atas dasar suka sama suka dan tidak mengandung unsur riba sehingga salah satu pihak tidak ada yang merasa dirugikan baik dari pihak penjual maupun pembeli. Dalam jual beli juga harus melalui jalan yang diperbolehkan menurut syara' dengan cara yang halal menurut peraturan-peraturan tentang aturan jual beli.

2. Rukun dan Syarat

Agar jual beli yang dibuat oleh para pihak mempunyai daya ikat, maka jual beli tersebut harus memenuhi rukun dan syaratnya. Transaksi jual beli membutuhkan rukun dan syarat sebagai penegaknya. Tanpa rukun dan syarat, jual beli akan menjadi tidak sah.²⁵ Rukun jual beli yang harus dipenuhi dan harus ada agar jual beli tersebut sah ada tiga macam, yaitu:

a. Pelaku transaksi, yaitu penjual dan pembeli

Penjual yaitu pemilik harta yang menjual barangnya atau orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain. Sedangkan pembeli adalah orang yang cakap yang dapat membelanjakan hartanya (uangnya).

²⁴Pudjihardjo, *Fiqh Muamalah Ekonomi Syariah*, (Malang: UB Pres, 2019), h. 26

²⁵Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), h.7

Orang yang berakad biasanya terdiri dari satu orang, beberapa orang dan bisa juga orang yang memiliki hak ('*aqid ashli*).²⁶

Orang yang berakad diperlukan syarat memiliki kecakapan bertindak hukum sempurna antara lain:

1. Berakal maksudnya adalah agar dia tidak terkecoh, dan dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya. Apabila salah satu pihak tidak berakal, maka jual beli yang diadakan hukumnya adalah tidak sah. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. Ani-Nisa ayat 5 sebagai berikut:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا
وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: *"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya, harta (mereka yang ada daam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik".*²⁷

2. Dengan kehendak sendiri, maksudnya adalah bahwa dalam melakukan jual beli salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan atas pihak lain, yang mengakibatkan pihak lain tersebut melakukan perbuatan

²⁶Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta:

Kencana, 2010), h. 52

²⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2010), h. 61

jual beli²⁸ bukan disebabkan kemauan sendiri melainkan ada unsur paksaan.

3. Keadaan tidak mubazir, maksudnya adalah bahwa pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli bukanlah manusia yang boros, sebab orang yang boros di dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak. Maksudnya, dia tidak dapat melakukan sendiri perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingannya sendiri.
4. Balig atau sudah dewasa.²⁹ Dewasa dalam hukum Islam adalah apabila telah berumur 15 tahun keatas atau telah bermimpi (bagi anak laki-laki) dan haid (bagi anak perempuan), karena tidak sah transaksi yang dilakukan oleh anak kecil, yang belum *mumayyiz*, orang gila ataupun orang yang dipaksa.³⁰ Tetapi, bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan, ana yang baik dan yang buruk, tetapi belum dewasa (belum mencapai 15 tahun dan belum bermimpi atau haid), menurut pendapat sebagian diperbolehkan melakukan perbuatan jual beli, khususnya untuk barang-barang yang kecil dan tidak bernilai tinggi.³¹

Setelah syarat tersebut terpenuhi, maka akad jual beli dapat dibuat dan harus selalu didasarkan pada kesepakatan antara penjual dan pembeli tanpa adanya paksaan karena jual beli yang mengandung paksaan tidak diperbolehkan dan harus ada unsur suka sama suka agar jual beli dapat dibuat.

²⁸Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h.141

²⁹Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), h.41

³⁰Shalah Ash-Shawi Dan Abdullah Al-Mushlih, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2008), h. 90

³¹Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*,.....,H.142

b. Objek transaksi

Objek transaksi yaitu sesuatu yang dibolehkan oleh syara' untuk dijual. Objek akad dapat berupa barang yang berwujud dan barang yang tidak berwujud. Dalam Islam tidak semua barang dapat diperjualbelikan. Menurut Sayid Sabiq objek jual beli harus memenuhi syarat, yang meliputi:

- 1) Barang tersebut harus suci dan halal karena tidak boleh menjual barang yang diharamkan atau najis seperti miras, daging babi dan bangkai. Barang yang mutanajis boleh diperjual belikan tetapi barang tersebut telah disucikan.³²
- 2) Barang itu dapat dimanfaatkan atau bermanfaat bagi manusia karena dalam Islam tidak boleh menjual barang yang tidak ada manfaatnya.³³
- 3) Barang tersebut adalah milik yang melakukan akad jual beli karena dilarang menjual barang yang bukan miliknya walaupun itu milik istrinya sendiri.
- 4) Barang itu dapat diserahkan ketika akad berlangsung karena barang yang dijadikan objek dalam jual beli tidak boleh ada masa waktunya saat terjadinya akad.
- 5) Barang tersebut diketahui bentuknya dan harganya sudah jelas artinya bahwa barang atau benda yang akan diperjualbelikan dapat diketahui banyaknya, beratnya, kualitasnya dan ukurannya agar tidak mengarah ke unsur yang mengandung penipuan.³⁴

Kelima syarat tersebut yang berkenaan dengan objek transaksi bersifat kumulatif dengan arti keseluruhannya harus dipenuhi untuk sahnya suatu transaksi. Namun, apabila salah satu syarat belum terpenuhi tetapi sudah menjadi muamalah umum dalam

³²Apipudin, *Konsep Jual Beli Dalam Islam, Jurnal Islaminomic*, Vol.V No. 2, Agustus 2016, h. 80 (On-Line), tersedia di <http://Jurnal.Stesisislamicvillage.Ac.Id/>, (2 Juli 2020, 17:00), Dapat Dipertanggungjawabkan Secara Ilmiah

³³Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru, 2016), h. 280

³⁴Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia.....*,h. 90

suatu tempat maka transaksi tersebut diterima oleh kebanyakan ulama hukum sahnya.³⁵

c. Akad

Akad adalah perikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah apabila ijab dan kabul belum dilakukan, karena ijab dan kabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya ijab kabul dilaksanakan secara lisan namun jika tidak mungkin dilakukan dengan lisan maka bisa dilakukan dengan cara surat menyurat atau media lain yang mengandung arti ijab dan kabul agar akad tersebut dapat terlaksana sesuai dengan kehendak kedua belah pihak.

Kerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelaan berhubungan dengan hati, tanda yang jelas yang menunjukkan kerelaan adalah ijab dan qabul. Ada empat jenis bentuk akad, yaitu: akad dengan lisan (*'aqad billisan*) yang tidak asing lagi serta mayoritas masyarakat banyak yang menggunakannya, akad dengan tulisan (*'aqad bil kitabah*) yang biasanya dilakukan jika salah satu pihak dalam kondisi yang tidak memungkinkan melakukan akad secara lisan, akad dengan isyarat (*'aqad bil isyarah*) biasanya dilakukan oleh orang yang tuna wicara, dan akad dengan perbuatan (*'aqad bil al-Muathah*).³⁶ Bentuk akad tersebut digunakan oleh para pihak sesuai dengan situasi dan kondisinya karena hal yang terpenting dalam suatu sahnya suatu akad adalah penyampaian kehendak yang meliputi pengertian, kejelasan dan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Dalam ijab qabul terdapat beberapa syarat, yaitu:

1. Syarat umum

Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai akad yaitu adalah kedua orang yang melakukan

³⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*,.....,h. 199

³⁶ Ahmad Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 68

akad cakap bertindak, yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya, akad itu diizinkan oleh syara” serta dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, dapat memberikan faedah, ijab terus berjalan hingga terjadinya kabul dan ijab dan qabul harus bersambung agar akad tidak menjadi batal.³⁷

2. Syarat khusus

Syarat khusus adalah syarat yang hanya ada pada barang-barang tertentu yang meliputi: barang yang diperjualbelikan harus dapat dipegang, harga awal harus diketahui seperti pada jual beli amanat, serah terima benda dilakukan sebelum berpisah, terpenuhi syarat penerimaan, harus **seimbang** dalam ukuran timbangan seperti

dalam jual beli yang memakai ukuran timbangan, tidak boleh menjual barang yang masih berada di tangan penjual.³⁸

Secara umum tujuan adanya rukun dan syarat adalah untuk

menjaga kemaslahatan orang yang sedang berakad dan untuk menghindari jual beli *gharar* (terdapat unsur penipuan) yang dapat merugikan salah satu pihak yang berakad.

3. Macam-Macamnya

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli.

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiuddin.³⁹ Dalam

³⁷

³⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 80

³⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2013), h.

jual beli bahwa jual beli telah terbagi menjadi tiga macam yaitu:⁴⁰

- a. Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada didepan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras dipasar.
- b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji ialah jual beli salam (pesanan) menurut kebiasaan para pedagang, *salam* adalah untuk jual beli tidak tunai, *salam* pada awalnya berarti meminjam barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditentukan ketika akad.
- c. Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.⁴¹

Menurut jumhur ulama jual beli terbagi menjadi 2 bagian, antara lain:

- a. Jual beli shahih yaitu adalah jual beli yang disyariatkan menurut asal dan sifatnya serta memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Namun, jual beli yang sah juga dapat dilarang dalam syariat bila melanggar ketentuan.⁴² Jual beli shahih menimbulkan implikasi hukum, yaitu berpindahnya kepemilikan maksudnya dalah barang berpindah kepemilikan menjadi milik pembeli dan harga berpindah kepemilikan menjadi milik penjual.

⁴⁰*Ibid.*, h. 76-77.

⁴¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,....., h.75

⁴²Gemala Dewi, Wiryaningsih Dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Prenadamedia Group, 2018), h.96

- b. Jual beli ghairu shahih yaitu jual beli yang tidak terpenuhi rukun dansyaratnya dan tidak mempunyai implikasi hukum terhadap objek akad.⁴³

Menurut Wahbah Al-Zuhaili membagi jual beli menjadi beberapa bagian yaitu:

- a. Jual beli yang dilarang karena ahlih atau ahli akad (penjual dan pembeli), yaitu:

- 1) Jual beli yang dilakukan orang gila adalah tidak sah, begitu juga jual beli yang dilakukan oleh orang yang sedang mabuk juga tidak sah karena dipandang tidak berakal
- 2) Jual beli anak kecil (belum mumazzis) dipandang tidak sah kecuali dalam perkara-perkara yang dianggap ringan.
- 3) Jual beli orang buta

Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang yang buta tanpa diterangkan sifatnya dipandang tidak sah, karena dianggap tidak bisa membedakan barang yang jelek dan yang baik, bahkan menurut pendapat ulama Syafi'iyah walaupun diterangkan juga sifatnya tetap dipandang tidak sah.

- 4) Jual beli fudhlul yaitu jual beli milik orang lain tanpa seizing pemiliknya, menurut para ulama jual beli yang⁴⁴ seperti ini dipandang tidak sah, karena dianggap mengambil hak orang lain (mencuri).
- 5) Jual beli orang yang terhalang baik karena sakit maupun bodoh adalah tidak sah, karena dianggap tidak punya kepandaian dan ucapannya dipandang tidak dapat untuk dipegang.
- 6) Jual beli Malja' yaitu jual beli yng dilakukan oleh orang yang sedang dalam bahaya. Jual beli yang

⁴³ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*,....., h. 71

⁴⁴ Khumedi Ja'Far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Bandar Lampung: Gemilang, 2018), h. 111

demikian menurut kebanyakan ulama adalah tidak sah, karena dipandang tidak normal sebagaimana yang terjadi pada umumnya.⁴⁵

b. Jual beli yang dilarang karena objek jual beli (barang yang diperjualbelikan), antara lain:

- 1) Jual beli Gharar yaitu jual beli yang mengandung ketidakjelasan yang terjadi pada salah satu dari penjual ataupun pembeli⁴⁶ dan dipandang tidak sah.
- 2) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan dianggap tidak sah karena tidak adanya kejelasan yang pasti.
- 3) Jual beli Majhul yaitu jual beli yang barangnya tidak dapat diketahui secara menyeluruh dan menurut Jumhur Ulama dianggap tidak sah karena akan mendatangkan pertentangan di antara manusia.
- 4) Jual beli sperma binatang yaitu jual beli sperma (mani) binatang seperti mengawinkan seekor sapi jantan dengan betina agar mendapat keturunan yang baik hukumnya adalah haram.
- 5) Jual beli barang yang dihukumkan najis oleh agama (Al-Qur'an) Jual beli barang yang sudah jelas hukumnya oleh agama seperti arak dan babi, hukumnya adalah haram.
- 6) Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya Jual beli yang demikian itu hukumnya adalah haram karena barang yang menjadi objek dari jual beli belum ada dan belum tampak jelas.
- 7) Jual beli Muzabanah adalah jual beli buah yang basah dengan buah yang kering, atau menjual padi yang kering dengan harga padi yang basah. Hal ini dilarang karena padi atau biji-bijian yang basah akan mengakibatkan timbangan menjadi berat dan

⁴⁵*Ibid.*, h. 112

⁴⁶Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Perspektif Maqashid Al-Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 247

mengandung unsur penipuan dalam transaksi semacam ini.⁴⁷ misalnya jual beli padi yang kering dengan bayaran padi yang basah, sedangkan ukurannya sama sehingga akan merugikan pemilik padi kering. Oleh karena itu jual beli seperti ini dilarang.

- 8) Jual beli Muhaqallah adalah jual beli tanam-tanaman yang masih dikebun atau di sawah, maka jual beli seperti ini dilarang oleh agama karena mengandung unsur riba di dalamnya.
- 9) Jual beli Mukhadharah yaitu jual beli buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, misalnya rambutan yang masih hijau. Maka jual beli seperti ini dilarang oleh agama sebab barang tersebut masih samar dalam artian bisa saja buah tersebut jatuh (rontok) tertiuip angin sebelum dipanen oleh pembeli sehingga akan menimbulkan kekecewaan salah satu pihak.
- 10) Jual beli mulammasah adalah jual beli secara sentuh menyentuh, misalnya seorang menyentuh sehelai kain yang berarti bahwa seseorang itu dianggap membeli kain tersebut maka jual beli yang seperti ini dilarang oleh agama karena mengandung unsur tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.
- 11) Jual beli Munabadzah yaitu jual beli secara lempar-melempar. Barang yang dilempar oleh penjual kemudian ditangkap oleh pembeli, tanpa mengetahui apa yang akan ditangkap itu. Maka jual beli seperti ini dilarang oleh agama karena mengandung tipuan dan dapat merugikan salah satu pihak.⁴⁸

⁴⁷Idri, *Hadis Ekonomi*....., h. 169

⁴⁸*Ibid.*,h. 170

4. Jual Beli Yang Dilarang

Menurut Hendi Suhendi Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut:⁴⁹

- a. Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai, dan khamar
- b. Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan sekor domba jantan dan betina agar dapat memperoleh keturunan.
- c. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya. Jual beli seperti ini dilarang, karena barangnya belum ada dan tidak tampak.
- d. Jual beli dengan *muhaqallah*, *baqalah* berarti tanah, sawah, dan kebun, maksud *muhaqallah* disini ialah menjual tanam-tanaman yang masih diladang atau disawah. Hal ini dilarang agama sebab ada persangkaan riba didalamnya.
- e. Jual beli dengan *mukhadharah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil, dan yang lainnya. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar, dalam artian mungkin saja buah itu jatuh tertiup angin kencang atau yang lainnya sebelum diambil oleh pembelinya.
- f. Jual beli dengan *muammassah*, yaitu jual beli dengan sentuh menyentuh, misalnya seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya diwaktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.
- g. Jual beli dengan *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar melempar, seperti seseorang berkata, “lemparkan

⁴⁹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 78.

kepadaku apa yang adapadamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku”, setelah terjadi lempar-melempar, terjadilah jual beli. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab dan qabul.

- h. Jual beli dengan *muzabanah*, ialah menjual buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah, sedangkan ukurannya dengan dikilo sehingga akan merugikan pemilik padi kering.
- i. Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjual belikan. Menurut Syafi’i penjualan seperti ini mengandung dua makna, yang pertama seperti seseorang berkata,” aku jual buku ini seharga Rp.35.000 dengan tunai atau Rp. 40.000 dengan cara utang”. Arti kedua adalah seperti seseorang berkata.” aku jual buku ini kepadamu dengan syarat kamu harus menjual tasmu kepadaku.”
- j. Jual beli dengan syarat (*iwadh mahjul*), jual beli dengan syarat hampir sama dengan jual beli dengan dua harga, hanya saja disini dianggap sebagai syarat, seperti seseorang berkata “aku jual rumahku yang butut ini kepadamu dengan syarat kamu mau menjual mobilmu kepadaku.” Jual beli seperti ini sama dengan jual beli dengan dua harga arti yang kedua menurut Al- Syafi’i.
- k. Jual beli *gharar*, ialah jual beli yang masih samar (tidak jelas) sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih dalam kolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tetapi dibawahnya jelek. Penjual seperti ini dilarang.
- l. Jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang dijual, seperti seseorang yang menjual sesuatu dari benda itu ada yang dikecualikan salah satu bagianya, misalnya menjual seluruh pohon-pohonan yang ada dikebunya, kecuali pohon pisang. Jual beli ini sah sebab yang

dikecualikannya jelas. Namun, bila yang dikecualikannya tidak jelas (*majhul*) jual beli tersebut batal.

- m. Larang menjual makanan hingga dua kali ditakar. Hal ini menunjukkan kurangnya saling percaya antar penjual dan pembeli. Jumhur ulama berpendapat bahwa seseorang yang membeli sesuatu dengan takaran dan telah diterimanya, kemudian ia jual kembali, maka ia tidak boleh menyerahkan kepada pembeli kedua dengan takaraan yang pertama hingga ia harus menakarnya lagi untuk pembeli kedua itu.

Jual beli yang dilarang sebab *Ahliyah* (ahli akad)

Ulama bahwa jual beli dikatakan shahih apabila dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dapat memilih dan mampu ber-tasharruf (mengelola) secara bebas dan baik. Mereka yang dipandang tidak sah jual belinya adalah sebagai berikut:⁵⁰

- a. Jual Beli Orang Gila

Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan orang yang gila tidak sah, begitu juga jual beli orang yang sedang mabuk juga tidak dianggap tidak sah, sebab ia dipandang tidak berakal.

- b. Jual Beli Anak Kecil

Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan anak kecil (belum mubazzis) dipandang tidak sah, karena belum memenuhi syarat dalam jual beli, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan.

- c. Jual Beli *Fudhlul*

Yaitu jual beli milik orang lain tanpa seizin pemiliknya, oleh karena itu menurut para ulama jual beli yang demikian dipandang tidak sah, sebab dianggap mengambil hak orang lain.

⁵⁰Kumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam*, (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), h. 111-112.

- d. Jual beli orang yang terhalang (sakit, bodoh atau pemboros)

Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang-orang terlarang baik karena ia sakit maupun kebodohnya dipandang tidak sah, sebab ia dianggap tidak mempunyai kepandaian dan tidak cakap hukum.

- e. Jual Beli Orang Buta

Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli yang dilakukan orang buta dipandang tidak sah tanpa diterangkan sifatnya, karena ia dianggap tidak bisa membedakan barang yang jelek dan barang yang bagus, bahkan menurut ulama Syafi'iyah walaupun diterangkan sifatnya tetap dipandang tidak sah.

- f. Jual Beli *Malja* ialah jual beli yang dilakukan oleh orang yang sedang dalam bahaya. Jual beli yang demikian menurut kebanyakan para ulama tidak sah, karena dalam jual beli tersebut dalam keadaan terdesak atau dalam bahaya dan dipandang tidak normal sebagai mana yang terjadi pada umumnya.

Jual beli yang dilarang karena lafaz (ijab qabul).⁵¹

- a. Jual beli *mu'athah* ialah jual beli yang telah disepakati oleh pihak (penjual dan pembeli) berkenaan dengan barang maupun harganya tetapi tidak memakai ijab qabul, jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena tidak memenuhi syarat dan rukun dalam jual beli.
- b. Jual beli yang tidak bersesuaian dengan ijab dan qabul

Maksudnya bahwa jual beli yang terjadi tidak sesuai antara ijab dari pihak penjual dengan qabul dari pihak pembeli, maka dipandang tidak sah, karena ada kemungkinan untuk meninggikan harga atau menurunkan barang.

⁵¹*Ibid.*,h. 116-118.

c. Jual beli *najasyi* ialah jual beli yang dilakukan dengan cara menambahkan atau melebihi harga penjual lain, dengan maksud memengaruhi orang agar orang itu mau membeli barang dari nya. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena dapat menimbulkan keterpaksaan (bukan kehendak sendiri) dan dapat menimbulkan perselisihan antara penjual.

d. Menjual diatas penjualan orang lain

Maksudnya bahwa menjual barang kepada orang lain dengan cara menurunkan harga, sehingga orang itu mau membeli barangnya. Contohnya: kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja kamu beli dengan harga yang lebih murah dari barang itu. Jual beli seperti ini dilarang agama karena dapat menimbulkan perselisihan (persaingan) tidak sehat antara penjual (pedagang).

e. Jual beli dibawah harga pasar

Maksudnya yaitu membeli barang (hasil pertanian) dengan cara menemui orang-orang (petani) desa sebelum mereka masuk pasar dengan harga semurah-murahnya sebelum tahu harga pasar, kemudian ia menjual, dengan harga yang setinggi-tingginya. Jual beli seperti ini dipandang kurang baik (dilarang), karena dapat merugikan pihak pemilik barang (petani) atau orang-orang desa.

f. Menawar barang yang sedang ditawar orang lain

Contoh seorang berkata: jangan terima tawaran orang itu nanti aku akan membeli dengan harga yang lebih tinggi. Jual beli seperti ini juga dilarang oleh agama sebab dapat menimbulkan persaingan tidak sehat dan dapat mendatangkan perselisihan diantara pedagang (penjual).

g. Jual beli *munjiz* ialah jual beli yang digantungkan dengan suatu syarat tertentu atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah,

karena penjual memberikan syarat tertentu dan bertentangan dengan syarat dan rukun jual beli.

Jual beli dilarang sebab *syara'*

Ulama' telah bersepakat membolehkan jual beli yang memenuhi persyaratan dan rukunnya. Namun demikian, terdapat beberapa masalah yang masih diperdebatkan diantara para ulama, di antaranya sebagai berikut:⁵²

- a. Jual beli riba menurut ulama Hanafiyah, riba *fadhli* dan riba *nasiyah* adalah *fāsid* tetapi menurut jumhūr ulama' batal.
- b. Jual beli menggunakan uang dari penjualan barang yang memang diharamkan.

Menurut ulama Hanafiyah, termasuk *fāsid* (rusak) dan terjadi *aqad* atas nilainya, sedangkan menurut jumhūr ulama' adalah batal sebab ada *nash* yang jelas dari *hadīst* bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah SAW mengharamkan jual beli, bangkai, khamar, patung dan anjing.

- c. Memperjualbelikan barang hasil Pencegatan

Yakni mencegat barang pedagang dalam perjalanannya menuju tempat yang dituju sehingga orang yang mencegatnya akan mendapatkan keuntungan. Ulama' Hanāfiyah menyatakan bahwa praktik seperti itu hukumnya *makrūh tahrīm*. Menurut ulama' Hanābilah dan Syāfi'iyah berpendapat, pembeli boleh melaksanakan *khiyār*, sedangkan menurut ulama' Mālikiyah hal semacam itu hukumnya *fāsid*.

- d. Jual beli waktu azan Jum'at

Yakni bagi laki-laki yang berkewajiban melaksanakan salat jum'at. Menurut ulama' Hanāfiyah dilarang

⁵²Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 99-101.

melakukan kegiatan transaksi pada azan pertama, sedangkan menurut ulama' lainnya, azan ketika *khatīb* sudah di mimbar.⁵³ Menurut ulama' Hanāfiyah menyatakan hal tersebut *makrūh tahrīm*, sedangkan menurut ulama' Syāfi'iyah menghukuminya *sahīh harām*.

- e. Jual beli anggur untuk bahan baku khamar Menurut ulama' Hanāfiyah dan Syāfi'iyah zahirnya sah, tetapi makruh, sedangkan menurut ulama' Mālikiyah dan Hanābilah adalah batal.
- f. Memperjualbelikan barang yang sedang dibeli oleh orang lain seseorang telah sepakat akan membeli suatu barang, namun masih dalam *khiyār*, kemudian seseorang datang dan menyuruh untuk membatalkannya transaksi tersebut sebab orang itu ingin membelinya dengan harga lebih tinggi.

- g. Jual beli menggunakan syarat

Menurut ulama' Hanāfiyah, hal tersebut sah apabila syarat yang diajukan baik, seperti, "saya ingin membeli baju ini dengan syarat dijahit dahulu". Begitu pula menurut ulama' Mālikiyah memperbolehkannya jika bermanfaat. Menurut ulama' Syāfi'iyah hal tersebut diperbolehkan apabila syarat tersebut merupakan untuk pihak yang melakukan aqad, sedangkan menurut ulama' Hanābilah, tidak diperbolehkan apabila hanya bermanfaat untuk salah satu yang aqad.

5. 'Urf (Adat Kebiasaan) Dalam Jual Beli

- a. Pengertian 'Urf

Kata '*urf*' secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat.⁵⁴ '*Urf* (tradisi) merupakan bentuk muamalah (berhubungan kepentingan)

⁵³*Ibid.*, h. 101.

⁵⁴Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, Cet ke-2,2011), h.

yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung konsisten di tengah masyarakat.⁵⁵ ‘Urf juga disebut dengan sesuatu yang terkenal dikalangan umat manusia selalu di ikut, baik ‘urf perkataan maupun ‘urf perbuatan.⁵⁶ Ulama’ *Ushuliyin* memberikan definisi:

“Apa yang bisa dimengerti manusia (sekelompok manusia) dan mereka jalankan baik berupa perkataan, perbuatan dan pantangan-pantangan”.⁵⁷ Dalam disiplin Ilmu Fiqh ada dua kata yang serupa yaitu ‘urf dan *adat*. Kedua kata ini perbedaannya adalah adat di definisikan sebagai sesuatu non rasional. Perbuatan tersebut menyangkut perbuatan pribadi, seperti kebiasaan makan dan tidur. Kemudian ‘urf diartikan sebagai kebiasaan.

العدة محكمة atau kebiasaan (tradisi) adalah salah satu hal yang memiliki kontribusi besar terhadap terjadinya tranformasi hukum *syar’i*. Di atas kebiasaan (tradisi) ini, banyak terbangun hukum fiqh dan *Qa’idah-Qa’idah furu’*.⁵⁸

Menurut Al-Zarqa *Al-Adat* adalah suatu kebiasaan baik yang berlaku secara umum (*adat al-‘am*) atau berlaku secara khusus (*adat al-khash*) bisa dijadikan penentu dalam menetapkan hukum *syar’i*, yaitu hukum *syar’i* yang tidak bertentangan dengan ketentuan nash secara khusus. Apabila dalil-dalil nash tidak berseberangan sama sekali dengan suatu kebiasaan maupun tradisi, atau berseberangan namun hanya secara umumnya saja, maka kebebasan tersebut bisa diterima sebagai hukum *syar’i*.⁵⁹

Maksud dari istilah “*adat al-am*” adalah kebiasaan yang berlaku secara luas dan mendominasi pada semua

⁵⁵Abu Zahro, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet ke-14, 2011), h. 416

⁵⁶Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet ke-1, 2008), h. 110

⁵⁷Masykur Anhari, *Ushul Fiqh*, (Surabaya: Diantama, Cet ke -1, 2008), h. 110

⁵⁸Ahmad Sudirman, *Qawa'id Fiqhiyah Dalam Perspektif Fiqh*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2004), h. 155

⁵⁹*Ibid.*, h. 163

daerah, seperti kebiasaan mereka dalam melakukan adat *istishna*. Sedangkan yang dimaksud” adat “*al-khash*”, adalah kebiasaan yang berlaku dan mendominasi pada sebagian daerah.

Ibnu Abidin mengatakan bahwa *al-adat* merupakan salah satu dalil (hujjah) *syar’i* terhadap masalah-masalah yang tidak tercover oleh nash. Ia juga mengutip pernyataan yang mengatakan bahwa membangun hukum berdasarkan adat yang *dzohir* adalah suatu kewajiban. Demikian apabila tidak ada nash-nash yang secara khusus menentanginya. Jika ada nash yang secara khusus menentanginya, maka posisi nash jelas mengalahkan adat, baik adat yang ‘*am* atau yang *khash*, karena nash lebih kuat dari pada (‘*urf*).⁶⁰

‘*Urf* secara teminologi menurut. Abd. Ramad Dahlan yaitu sesuatu menjadi kebiasaan manusia, mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer diantara mereka ataupun satu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam etimologi dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahami dalam pengertian lain.⁶¹

Al-‘Adah/ al-‘Urf adalah sesuatu yang memiliki kesamaan dengan apa yang dianggap benar oleh kalangan ahli agama yang memiliki kesamaan dengan apa yang dianggap benar oleh kalangan ahli agama yang memiliki akal sehat (uli-al-bab) dan mereka tidak mengingkarinya.⁶²

Menurut Imam al-Qurtubi bahwa *Al-‘urf, al-ma’ruf*, dan *al-arifah*, adalah suatu kebiasaan (perilaku baik), yang dilakukan oleh masyarakat, di mana akal merelakan dan hati merasa nyaman terhadapnya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengertian ‘*urf* bisa dibagi menjadi dua yaitu secara terminologi dan definisi kata. ‘*Urf* secara terminologi berarti

⁶⁰*Ibid.*, h. 167

⁶¹Abd. Rahman Dahlan, *Ushul fiqh*,..... h. 209

⁶²Ahmad Sudirman, h. 165

suatu yang sudah dimengerti oleh sekelompok manusia baik berupa perbuatan dan ucapan. Sedangkan dalam definisi kata yaitu ada dua kata menurut mayoritas ulama adalah *'urf* dan adat keduanya berarti sesuatu yang dikenal dan diulang.

b. Macam-macam *'Urf*

Para ulama ushul membagi *'urf* menjadi tiga macam:

1. Dari segi objeknya *urf* dibagi kepada kebiasaan yang menyangkut ungkapan dan kebiasaan yang berbentuk kebiasaan.

a. Kebiasaan yang menyangkut ungkapan (*al-'Urf-lafdzi*)

b. Kebiasaan yang menyangkut ungkapan ialah kebiasaan masyarakat yang menggunakan kebiasaan *lafdzi* atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu.⁶³

c. Kebiasaan yang berbentuk (*al-'urf al-amal*)

d. Kebiasaan yang berbentuk perbuatan merupakan kebiasaan biasa atau kebiasaan masyarakat yang berhubungan dengan muamalah keperdataan. Misalnya kebiasaan masyarakat yang melakukan jual beli yaitu seorang pembeli mengambil barang dikasir tanpa adanya suatu akad ucapan yang dilakukan keduanya.

2. Dari segi cakupannya *'urf* dibagi menjadi dua yaitu kebiasaan yang bersifat umum dan kebiasaan yang bersifat khusus.

a. Kebiasaan yang bersifat umum (*al-'urf al-am*)

Kebiasaan yang umum adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah dan negara.

Ulama Madzhab Hanafi mengatakan bahwa *'urf* ini (*'urf'am*) dapat mengalahkan *qiyas*, kemudian

⁶³ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, Jilid II (Jakarta: Kencana, 2011), h. 389

dinamakan istihsan '*urf*. '*Urf* ini dapat men-takhsis nash yang '*am* yang bersifat *zhanni*, bukan *qath'i*. Diantara meninggalkan keumuman dari nash *zhanni* karena adanya '*urf* yaitu larangan nabi SAW mengenai jual beli yang disertai dengan adanya syarat. Dalam hal ini, *jumhur* ulama madzab Hanafy dan Maliky menetapkan kebolehan diberlakukannya semua syarat, jika memang berlakunya syarat itu dipandang telah menjadi '*urf* (tradisi).

b. Kebiasaan yang bersifat khusus (*al-urf al-khash*)

Kebiasaan yang bersifat khusus adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan di masyarakat tertentu. Sedangkan menurut Abu Zahra lebih terperinci lagi yaitu '*urf* yang berlaku di suatu negara, wilayah atau golongan masyarakat tertentu misalnya kebiasaan mengenai penentuan masa garansi terhadap barang-barang tertentu. '*Urf* semacam ini tidak boleh berlawanan dengan nash. Hanya boleh berlawanan dengan qiyas yang *illat-nya* ditemukan tidak melalui jalan *qathiy*, baik berupa nash yang *illat-nya* ditemukan tidak melalui jalan *qathiy*, baik berupa nash maupun yang menyerupai nash dari segi jelas dan terangnya.

3. Dari segi keabsahannya dari pandangan *syara'*, '*urf* terbagi dua yaitu kebiasaan yang dianggap sah dan kebiasaan dianggap rusak.

a. Kebiasaan dianggap sah (*al-'Urf al-sahih*)

Kebiasaan yang dianggap sah adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash* (ayat atau hadis) tidak menghilangkan kemaslahatan mereka atau tidak pula meninggalkan *madarat* kepada mereka. Atau dengan kata lain tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib.

b. Kebiasaan yang dianggap rusak (*al-‘urf fasid*)

Kebiasaan yang dianggap rusak merupakan kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil *syara*’serta kaidah-kaidah dasar yang ada dalam *syara*’, seperti dikalangan pedagang yang menghalalkan riba, misalnya peminjaman uang antar sesama pedagang.

Praktik ini adalah praktik peminjaman yang berlaku di zaman jahiliah yang dikenal dengan sebutan riba *al-nasi’ah* (riba yang muncul dari pinjam meminjam. Oleh sebab itu menurut ulama ushul fiqh dalam kategori *al-urf al-fasid*.

c. Syarat-syarat ‘*Urf*

1. ‘*Urf* mengandung kemaslahatan yang logis.

Syarat merupakan sesuatu yang mutlak ada pada ‘*urf* yang sah. Sehingga dapat diterima masyarakat umum. Dalam arti tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan Sunnah. Sebaliknya, apabila ‘*urf* itu mendatangkan kemudharatan dan tidak dapat logika, maka ‘*urf* yang demikian tidak dapat dibenarkan dalam Islam.

2. ‘*Urf* tersebut berlaku umum pada masyarakat yang terkait dengan lingkungan ‘*urf*, atau minimal dikalangan sebagian besar masyarakat.
3. ‘*Urf* yang dijadikan dasar bagi penetapan suatu hukum telah berlaku pada saat itu, bukan ‘*urf* yang muncul kemudian. Berarti ‘*urf* ini harus telah ada sebelum penetapan hukum.
4. ‘*Urf* tidak bertentangan dengan nash, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung nash itu tidak bisa diterapkan. Misalnya, kebiasaan suatu negeri bahwa sah mengembalikan harta amanah istri atau anak dari pihak pemberi. Kebiasaan

seperti ini dapat dijadikan pegangan jika terjadi tuntutan dari pemilik harta itu sendiri.⁶⁴

B. Akad dan Akibat Hukumnya

1. Pengertian dan Dasar Hukum

a. Pengertian

Akad berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti perikatan, perjanjian dan permufakatan.⁶⁵ Secara etimologi (bahasa), *'aqad* mempunyai beberapa arti, antara lain:

- 1) Mengikat (*ar-rabithu*), yaitu mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sebagai sepotong benda
- 2) Sambungan (*aqdatun*), yaitu: Sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya.
- 3) Janji (*Al-'Ahdu*), sebagaimana dijelaskan dalam Al-qur'an surat (QS. Ali-Imran 3:76)

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya: “*Sebenarnya barang siapa yang menepati janji dan bertakwa, makasesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa*”.⁶⁶

Secara istilah (terminologi) akad berarti: Perikatan ijab qabul yang dibenarkan *syara'* yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak. Kehendak atau keinginan pihak pihak terikat

⁶⁴Satria Effendi, M.Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, cet ke-1, 2005), h.

⁶⁵Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gayamedia Pratama, 2007), h.

⁶⁶Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamala*,....., h. 42.

itu sifatnya tersembunyi dalam hati karena itu untuk mengungkapkan keinginan tersebut diungkap dengan suatu pernyataan yang disebut dengan ijab dan qabul. Dalam istilah fiqh, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak seperti talak, sumpah maupun yang muncul dari dua pihak seperti jual beli, sewa menyewa, wakalah dan gadai.

Secara khusus akad berarti kesetaraan antara ijab (pernyataan pemindahan kepemilikan) dan qabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu. Sedangkan makna akad secara umum yaitu adalah setiap perilaku yang melahirkan hak atau mengalihkan atau mengubah atau mengakhiri hak, baik itu bersumber dari satu pihak maupun dua pihak.⁶⁷

Menurut Ahmad Azhar Basyir, akad adalah suatu perikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan *syara'* dan menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. Sedangkan menurut pasal 20 ayat 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, akad yaitu kesepakatan yang ada dalam suatu perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.⁶⁸

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa akad adalah pertalian ijab (ungkapan tawaran di satu pihak yang mengadakan kontrak) dengan qabul (ungkapan penerimaan oleh pihak pihak lain) yang memberikan pengaruh pada suatu kontrak.

- b. Dasar hukum akad dalam Al-Qur'an adalah surah Al-Maidah ayat 1 sebagai berikut :

⁶⁷Oni Sahroni, M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 5.

⁶⁸Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*,....., h. 10.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا
مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيدُ



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum –hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.⁶⁹

2. Rukun dan Syarat

Rukun-rukun akad menurut kalangan jumbuh fuqaha adalah sebagai berikut:

1) ‘Aqid yaitu orang yang melakukan akad

Pelaku akad yang dimaksud di sini adalah bisa berupa satu orang atau banyak orang. Subjek akad dapat berbentuk perorangan atau dan dapat juga dalam bentuk badan hukum.

Orang yang berakad disyaratkan mempunyai kemampuan (*ahliyah*) dan kewenangan (*wilayah*) untuk melakukan akad yakni mempunyai kewenangan melakukan akad. *Ahliyah* yaitu kemampuan atau kepantasan seseorang untuk menerima beban *syara'* berupa hak- hak dan kewajiban serta kesahan tindakan hukumnya, seperti berakal yang memiliki makna tidak gila sehingga mampu memahami ucapan yang dikatakan oleh orang lain. Biasanya mereka akan memiliki *ahliyah* apabila mereka telah *baligh*. Wilayah merupakan kekuasaan atau kewenangan secara syar'i yang

⁶⁹Depag RI, *Al-Qur'An dan Terjemahnya*, (Semarang: Pt Karyatoha Putra, 2002), h. 141

memungkinkan pemiliknya melakukan akad dan tindakan hukum yang menimbulkan akibat hukum.⁷⁰ Dan yang terpenting yaitu orang yang melakukan akad harus bebas dari tekanan sehingga mampu memilih secara bebas yang dikehendaki.

2) *Ma'qud 'alaih* yaitu benda yang diakadkan

Objek akad yaitu harga atau barang yang menjadi objek transaksi. Syarat-syarat *Ma'qud 'alaih* antara lain adalah:

1) Barang yang *masyru'*

Barang yang dimaksud adalah barang yang menurut hukum Islam sah untuk dijadikan sebagai objek kontrak, yaitu barang yang dimiliki serta halal dimanfaatkan.

2) Bisa diserahkan waktu akad

Objek akad harus dapat diserahkan ketika terjadi kontrak agar tidak adanya penipuan, namun tidak berarti harus dapat diserahkan seketika. Barang yang tidak bisa diserahkan itu tidak boleh menjadi objek transaksi. Walaupun barang tersebut dimiliki penjual.

3) Jelas diketahui oleh para pihak akad

Objek akad harus jelas dan diketahui oleh kedua belah pihak. Barang yang tidak jelas diketahui oleh para pihak akad itu tidak boleh menjadi objek transaksi. Apabila syarat ini tidak terpenuhi, maka akan timbul suatu perselisihan.

4) Objek akad harus ada pada saat akad

Objek akad harus sudah ada secara konkret ketika kontrak dilangsungkan.⁷¹ Barang yang dijadikan objek akad diketahui banyaknya, beratnya, kualitasnya serta

⁷⁰Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah*,....., h. 48.

⁷¹Oni Sahrani, M. Hasanuddin, *Fiqh Muamalah*,....., h. 38.

ukurannya agar tidak mengarah pada unsur yang mengandung penipuan.⁷²

- 3) *Shighat al aqd* yaitu ijab dan qabul, ijab yaitu permulaan penjelasan yang keluar dari salah seseorang yang berakad sebagai gambaran keinginannya untuk mengadakan akad, sedangkan qabul yaitu perkataan yang keluar dari pihak berakad pula yang diucapkan setelah adanya ijab.

Para ulama fiqh menetapkan adanya beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam suatu akad. Adapun syarat terjadinya akad ada dua macam, yaitu:

- 1) Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad. Syarat-syarat umum tersebut antara lain: pihak-pihak yang melakukan akad adalah pihak yang dipandang mampu bertindak menurut hukum (*mukallaḥ*), objek akad diketahui oleh *syara'* yang harus memenuhi syarat-syarat di antaranya dimiliki oleh seseorang yang berbentuk harta serta bernilai menurut *syara'*, akad tersebut tidak dilarang oleh nash *syara'*, akad yang dilakukan tersebut memenuhi syarat-syarat khusus dengan akad yang bersangkutan, akad tersebut bermanfaat dan ijab tetap utuh sampai terjadinya qabul.
- 2) Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini juga disebut dengan *idhafi* (tambahan) yang harus ada di samping syarat-syarat umum. Syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad yaitu: kedua orang yang melakukan akad cakap dalam bertindak atau ahli, objek akad dapat menerima hukumnya, akad itu diizinkan oleh *syara'*, bukan akad yang dilarang oleh *syara'*, ijab berjalan terus serta tidak dicabut sebelum terjadi qabul, ijab dan qabul harus bersambung sehingga

⁷²Shalah Ash-Shawi Dan Abdullah Al-Mushih, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*,..... h. 28.

bila seseorang yang berijab sudah berpisah sebelum terjadinya qabul maka ijab tersebut menjadi batal.⁷³

3. Akibat Hukumnya

Menurut para ulama fiqh, setiap akad mempunyai akibat hukum yaitu tercapainya sasaran yang ingin dicapai sejak semula,⁷⁴ seperti pemindahan hak milik dari penjual kepada pembeli dan akad itu bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, tidak boleh dibatalkan kecuali disebabkan hal-hal yang dibenarkan syara', seperti terdapat cacat pada objek akad atau akad itu tidak memenuhi salah satu dari rukun dan syarat akad.⁷⁵

Akibat hukum dalam Islam dibedakan menjadi dua yaitu:

- a) Akibat hukum pokok yang disebut dengan hukum akad (*hukm al aqd*) Hukum akad yang dimaksud adalah terwujudnya tujuan akad yang menjadi kehendak bersama untuk diwujudkan oleh para pihak.
- b) Akibat hukum tambahan yang disebut hak-hak akad
Akibat hukum tambahan maksudnya adalah dengan timbulnya hak-hak dan kewajiban pada masing-masing pihak dalam rangka mendukung dan memperkuat akibat hukum pokok.⁷⁶

Apabila suatu akad telah memenuhi rukun dan syaratnya maka akad tersebut sah tetapi, ada kemungkinan bahwa akibat hukum akad belum dapat dilaksanakan.⁷⁷ Untuk

⁷³Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah*,..... h. 55.

⁷⁴Madmudatus Sa'diyah, *Fiqh Muamalah II*, (Jepara: UNISNU PRESS,2019), h. 5

⁷⁵Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h. 106

⁷⁶ Ruslan Abd Ghofur, Akibat Hukum Dan Terminasi Akad Dalam Fiqh Muamalah, *Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, Vol.2 No.2, Juli 2010, h. 6, (On-Line), Tersedia di <http://Ejournal.Radenintan.Ac.Id/>, (13 Maret 2020,08:42), dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah

⁷⁷Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), H.101

dapat dilaksanakan akibat hukumnya, akad yang sudah sah tersebut harus memenuhi dua syarat berlakunya akibat hukum yaitu:

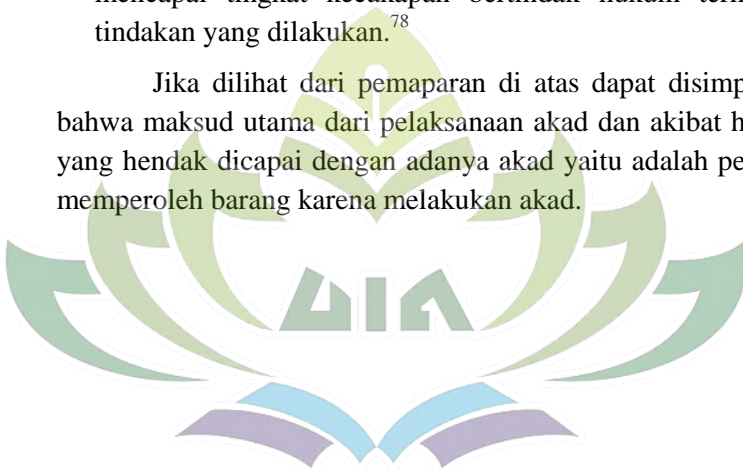
a) Adanya kewenangan sempurna atas objek akad

Kewenangan atas objek barang terpenuhi apabila mempunyai kepemilikan atas objek yang bersangkutan atau mendapat kuasa daripemilik dan objek tersebut tidak tersangkut hak orang lain.

b) Adanya kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan.

Kewenangan atas tindakan hukum terpenuhi apabila telah mencapai tingkat kecakapan bertindak hukum terhadap tindakan yang dilakukan.⁷⁸

Jika dilihat dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa maksud utama dari pelaksanaan akad dan akibat hukum yang hendak dicapai dengan adanya akad yaitu adalah pembeli memperoleh barang karena melakukan akad.



⁷⁸*Ibid.*, h. 103

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Hadist

A Hasan, *Terjema Bulughul Maram*, Bandung: Cv Dipongoro, 1989

Al-Aqhasalany Imam Ibnu Hajar, *Bulughul Maram*, Jakarta: Pustaka Amani

Depag Ri, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Semarang: Pt Karyatoha Putra, 2002

Departemen Agama Ri, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Bandung: Cv Diponegoro, 2010

Thalib, Muhammad, *Al-Quranul Karim Terjemahan Tafsiriah*, Solo: Cv Qolam Mas, 2012

Rizal Hamid, Syamsul, *Hadis & Sunah Pilihan*, Depok: Kaysa Media, Kaysa Media, 2017

Shan'ani, As, *Subulus Salam III*, terj. Abu Bakar Muhammad, Surabaya: Al-ikhlas, 1995

B. Buku

Abdullah Al-Mushih Dan Shalah Ash-Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*

Abdullah, Sulaiman, *Sumber Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet Ke-1, 2008

Abdullah Al-Mushlih Dan Shalah Ash-Shawi, *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2008

Anshori, Abdul Ghofur *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018

Anhari, Masykur, *Ushul Fiqh*, Surabaya: Diantama, Cet Ke -1, 2008

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010

Dahlan, Abd. Rahman, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, Cet Ke-2, 2011

Farid Wajdi, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014

Farid Wajdi Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*

Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010

Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gayamedia Pratama, 2007

Ja'far, Khumaidi, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis, Bandar Lampung: Pusat Penelitian Dan Penerbitan Iain Raden Intan Lampung, 2015

M. Hasanuddin, Oni Sahroni, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016

M.Zein, Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, Cet Ke-1, 2005

Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2013

_____*Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2015

Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Adiyta Bakti, 2004

Mustofa, Imam, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2016

Nasution, Mustafa Edwin, Et Al.,Eds., *Pengenalan Ekonomi Islam*

Pudjihardjo, *Fiqh Muamalah Ekonomi Syariah*, Malang: UB Pres, 2019

Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2016

Ru'fah Abdullah, Sohari Sahrani, *Fiqh Muamalah*

Sapiudin Shidiq, Ghazaly, Ghufon Ihsan, *Fiqh Muamalah*

Sarwat, Ahmad, *Ensiklopedia Fikih Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018

Sudirman, Ahmad, *Qawa'id Fiqhiyah Dalam Perspektif Fiqh*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2004

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif*, Bandung: Alfa Beta, 2008

Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016

Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2006

_____ *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001

Syafuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid 1*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997

_____ Amir, *Ushul Fiqh*, Jilid 2 Jakarta: Kencana, 2011

Zahro, Abu, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet Ke-14, 2011

C. Jurnal dan Sumber lain

Mariyansyah, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Akad Jual Beli Pepaya yang Terikat Harga pada Pengepul" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2018), h. 5

Muhammad syamsudin, "*jual beli bersyarat yang dilarang syariat*". (on-line), tersdia di:
<https://Islam.nu.or.id/post/read/95790/jual-beli-bersyarat-yang-dilarang-syariat> (13 Agustus 2019)

Panjaitan, Andre Budiman, *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Asuransi Pertanian Di Indonesia Setelah Pemberlakuan UU No 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani* Skripsi, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 2014

Shofa, Alya Aizza, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Padi dengan Sistem Tebas” (Skripsi,UM Surakarta,2016), h.

2

D. Wawancara

Biran, pemilik mesin pemanen padi, *Wawancara*, 10 Februari 2021

Budi, Penyewa mesin, *Wawancara*, 10 Februari 2021

Doni, Penyewa mesin, *Wawancara*, 10 Februari 2021

Eko, Penyewa mesin, *Wawancara*, 10 Februari 2021

Heru, Pemilik mesin pemanen padi, *Wawancara*, 10 Februari 2021

Muhtar, Penyewa mesin, *Wawancara*, 10 Februari 2021

Samuri, Penyewa mesin, *Wawancara*, 10 Februari 2021

Toib, Penyewa mesin, *Wawancara*, 10 Februari 2021

Toni, Penyewa mesin, *Wawancara*, 10 Februari 2021

Udin, Penyewa mesin, *Wawancara*, 10 Februari 2021

Waluyo, Penyewa mesin, *Wawancara*, 10 Februari 2021

Wanto, Penyewa mesin, *Wawancara*, 10 Februari 2021

